

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, yang berhubungan dengan Proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien, berhasil, bersih dan bertanggungjawab dalam perwujudan good governance maka perlu dikembangkan media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Terdapat beberapa tahapan dalam proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yaitu:

1. Menyiapkan Rencana Strategis
2. Menyiapkan Rencana Kinerja Tahunan
3. Menyiapkan Perjanjian Kinerja
4. Melakukan Evaluasi Kinerja
5. Melakukan Analisis Akuntabilitas Kinerja
6. Menyajikan Akuntabilitas Keuangan

#### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari pembahasan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas maka sangat perlu dilakukan komitmen dari semua stakeholders khususnya dalam pelaksanaan perencanaan sehingga dapat diukur keberhasilannya.
2. Untuk meraih keberhasilan dari program yang telah ditetapkan maka perlunya untuk memberi pembinaan dan pelatihan kepada Pengurus Panti Swasta dalam rangka peningkatan profesionalitas
3. Agar dapat menciptakan *Good Governance* maka sangat perlu dilakukan reviu rencana strategis agar dapat mengetahui kendala dalam mencapai target dan melakukan pembaharuan untuk mengatasi kendala tersebut

